

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab yang kedua pada penelitian ini berisi tinjauan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Hal ini digunakan untuk panduan memahami faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kemiskinan. Dengan adanya teori – teori yang mendukung akan mempermudah memahami masalah yang menimbulkan kemiskinan.

2.1 Kerangka Teori

Pada bagian ini akan membahas teori-teori yang mendasari penelitian ini. Pembahasan ini sebagai panduan dalam memahami permasalahan yang ada. Secara keseluruhan penelitian ini mencakup laju pertumbuhan ekonomi, pengangguran, jumlah penduduk, dan kemiskinan.

2.1.1 Kemiskinan

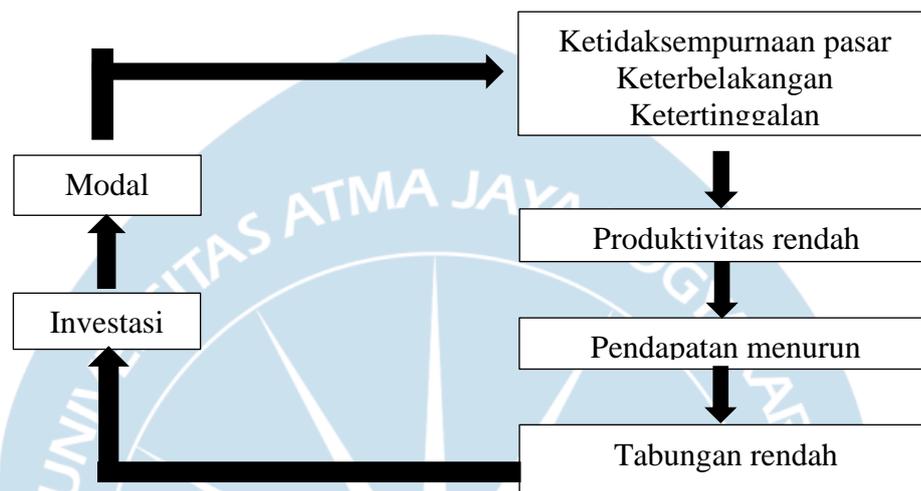
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang mendasar bagi setiap negara. Kemiskinan merupakan sebuah keadaan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan Susanto & Pangesti (2020). Dalam BPS (2023) mendefinisikan kemiskinan adalah kondisi ekonomi masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diukur dari sisi pengeluaran. Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makanan, serta kebutuhan pakaian yang digunakan oleh masyarakat. Pengeluaran seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok selama satu bulan dapat dilihat dalam Garis Kemiskinan (GK). Garis

Kemiskinan (GK) terbagi menjadi dua yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) menghitung biaya pengeluaran paling kecil makanan yaitu sebesar 2.100 kalori perorang dalam satu hari, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) menghitung pengeluaran paling kecil non makanan seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Apabila masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan seperti pangan dengan ketentuan 2.100 kalori perhari digolongkan masyarakat belum bisa memenuhi kebutuhan pangan. Dalam Bappenas (2018) dijelaskan terdapat tiga indikator ukuran kemiskinan, yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan (P0) yaitu perbandingan penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Apabila hal ini terjadi, masyarakat tidak cukup untuk memenuhi ketentuan kesejahteraan.
2. Kedalaman Kemiskinan (P1) yaitu rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Nilai P1 yang bertambah tinggi, maka penduduk miskin akan bertambah miskin. Hal ini dikarenakan bertambah jauhnya pengeluaran per kapita dari garis kemiskinan.
3. Keparahan Kemiskinan (P2) yaitu rata-rata dari kuadrat selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Nilai P2 yang bertambah tinggi, maka bertambah miskinnya penduduk paling miskin. Hal ini dikarenakan bobot yang lebih tinggi diterapkan oleh pengkuadratan selisih pengeluaran per kapita.

Berdasarkan Gambar 2.1 menunjukkan adanya hubungan dari kegagalan pasar, keterbelakangan, dan ketertinggalan sehingga menyebabkan produktivitas pada masyarakat menjadi rendah. Produktivitas yang rendah akan memengaruhi pendapatan masyarakat menjadi menurun sehingga berdampak pada tabungan masyarakat menjadi

rendah. Ketika tabungan rendah maka investasi dan modal dalam masyarakat juga akan rendah yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan.



Gambar 2. 1

Teori Lingkaran Kemiskinan (*vicious circle of poverty*)

Sumber: Kuncoro, 2006.

Menurut Santoso (2012) produktivitas pada masyarakat dapat meningkat apabila angkatan kerja mendapatkan pendidikan yang tinggi untuk bersaing dalam tingkat penawaran kerja. Seseorang yang kurang terampil dan terbatas pada pendidikan akan mengalami ketimpangan penghasilan. Keadaan ini akan mengurangi produktivitas karena tenaga kerja yang kurang terampil dan terdidik akan cenderung mengalami kesenjangan penghasilan. Penghasilan dapat menjadi penentu seseorang seberapa baik dan banyaknya konsumsi barang dan jasa. Penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi dibagi menjadi tiga faktor yaitu Kuncoro (2006):

- a. Secara mikro, kemiskinan disebabkan oleh sumber daya yang timpang sehingga menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata.

- b. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kualitas sumber daya yang rendah. Terkhususnya sumber daya manusia yang rendah akan berdampak pada tingkat produktifitas. Ketika produktifitas masyarakat menurun maka tingkat pendapatan masyarakat akan rendah.
- c. Kemiskinan berasal dari adanya ketimpangan pada akses modal.

Penduduk yang mengalami masalah kemiskinan khususnya negara berkembang sering terjadi pada masyarakat yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini terjadi karena infrastruktur dan fasilitas untuk kegiatan ekonomi di perkotaan lebih baik dari pada di daerah pedesaan sehingga menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah kemiskinan Setyowati & Melati (2020). Infrastruktur meliputi akses jalan, ketersediaan kendaraan, serta fasilitas umum pada suatu wilayah. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan sehingga membentuk sebuah lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) akibatnya tidak mempunyai ujung dan pangkalnya oleh pemikiran Ragnar Nurske dalam Kuncoro (2006).

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh usaha perbaikan ekonomi suatu daerah atau negara. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah. PDRB dibagi menjadi dua yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Menurut BPS (2023) PDB atas dasar harga berlaku dihitung melalui jumlah biaya yang dikeluarkan pemerintah seperti belanja pegawai, belanja barang atau peralatan, belanja bantuan sosial, dan lain sebagainya.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung melalui pengeluaran konsumsi pemerintah yang dihitung dari metode deflasi dan ekstrapolasi. Menurut Putri (2020) sederhananya PDB berdasarkan harga pasar menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahunnya, sedangkan produk domestik bruto berdasarkan harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun tersebut. Produk domestik bruto (PDB) adalah penjumlahan nilai output barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah atau kawasan selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Proses pembangunan ekonomi dapat terjadi kegagalan pemerintah dalam proses realisasinya. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam mengelola laju pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Apabila hal ini terus terjadi pada proses pembangunan ekonomi akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraannya dapat menambah angka kemiskinan yang mempengaruhi sektor lainnya.

2.1.3 Pengangguran

Menurut Prasetyoningrum & Sukmawati (2018) pengangguran menjadi salah satu masalah yang kompleks dalam sebuah daerah atau negara. Dengan adanya pengangguran potensi masyarakat akan terbuang percuma. Hal ini sangat mempengaruhi produktifitas masyarakat sehingga pendapatan pada masyarakat akan menurun hingga kebutuhan tidak dapat tercukupi baik sandang, pangan, dan papan. Dalam BPS (2023) dijelaskan kelompok orang dewasa ke beberapa kategori yang pertama, bekerja merupakan sebuah kondisi dimana seseorang sedang melakukan kegiatan ekonomi yang berorientasi kepada penghasilan. Kedua, pengangguran

merupakan sebuah kondisi dimana seseorang sedang berhenti bekerja baik dalam waktu singkat maupun sedang mencari pekerjaan. Ketiga, bukan Angkatan kerja merupakan penduduk pada usia kerja lebih dari lima belas tahun yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau sedang melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Salah satu cara yang dapat pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah adanya kebijakan untuk memperluas kesempatan kerja dengan memperluas lapangan pekerjaan baik industri padat karya maupun usaha rumahan (UMKM). Dengan adanya kebijakan ini akan membantu mengatasi masalah pengangguran yang terjadi pada suatu wilayah atau negara Hilmi dkk. (2022).

2.1.4 Jumlah Penduduk

Sumber daya manusia pada suatu negara sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas perekonomian. Banyaknya sumber daya manusia apabila dilakukan peningkatan potensi setiap individu maka akan sangat membantu pergerakan roda perekonomian. Jumlah penduduk akan semakin meningkat pada setiap tahunnya tergantung dari daerah atau negaranya. Apabila jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan maka akan memperparah masalah kemiskinan di suatu daerah atau negara. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak berkualitas dapat memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya angka pertumbuhan ekonomi dan naiknya angka pengangguran yang menyebabkan masalah kemiskinan semakin kompleks Azizah dkk. (2018). Menurut Suhandi dkk. (2018) untuk mengatasi masalah jumlah penduduk pada suatu daerah atau negara dapat dilakukan dengan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang fertilitas, mortalitas, morbilitas, tenaga kerja, perkawinan, dan tentang rumah tangga. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam

melakukan kebijakan terkait program perencanaan sehingga program dapat direalisasikan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat lebih terjamin dan masalah kemiskinan dapat teratasi.

2.2 Studi Terkait

Menurut Widowati dkk. (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perlu adanya dorongan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada sektor pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian khususnya Provinsi Jawa Tengah dengan agar kesejahteraan masyarakat dapat diperbaiki. Adanya pelatihan bagi masyarakat dapat membantu memperbaiki potensi serta adanya perluasan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga masalah pengangguran dapat teratasi. Pengendalian jumlah penduduk dapat membantu menekan masalah kemiskinan dengan cara program keluarga berencana. Selain itu pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta dan berbagai pihak untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan.

Untuk mengatasi masalah pengangguran diperlukan beberapa upaya agar tidak semakin kompleks. Apabila masalah pengangguran semakin parah akan sangat mempengaruhi meningkatnya kemiskinan di Kepulauan Sangihe. Upaya lain dapat dilakukan dengan menekan angka kelahiran serta memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Adanya pelatihan kepada masyarakat dapat meningkatkan keahlian masyarakat bagi yang kurang mampu dan pemberian bantuan sosial lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan melakukan perluasan lapangan kerja dengan harapan pendapatan masyarakat akan meningkat Lendentariang dkk. (2019).

Dalam penelitian Agustina dkk. (2018) dijelaskan bahwa masalah kemiskinan perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Apabila masalah kemiskinan semakin parah akan mengganggu proses pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan seperti menarik investor untuk membuka lapangan usaha sehingga perluasan lapangan kerja dapat membantu masyarakat untuk mengurangi pengangguran. Tingkat pengangguran yang semakin menurun maka tingkat kemiskinan akan menurun karena pendapatan masyarakat bertambah. Untuk membantu masyarakat mendapatkan peluang pekerjaan, pihak pemerintah perlu melakukan pelatihan bagi masyarakat kurang mampu agar potensi masyarakat dapat lebih berkembang. Dengan hal ini harapannya masyarakat dapat lebih produktif dalam dunia kerja.

Salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran adalah kurangnya ketrampilan masyarakat dalam dunia kerja. Hal ini disebabkan tidak semua masyarakat kurang mampu dapat menerima pendidikan formal karena keterbatasan biaya. Peran pemerintah perlu memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu dan adanya pelatihan untuk memperbaiki kemampuan yang masyarakat miliki. Selain itu, pemerintah juga perlu menekan laju pertumbuhan penduduk, program transmigrasi, dan pemerataan lapangan kerja bagi masyarakat. Apabila upaya – upaya tersebut dapat direalisasikan dengan baik akan sangat membantu masyarakat hidup lebih layak dan angka kemiskinan dapat menurun Berliani (2021).

Menurut Salsabil & Rianti (2023) menjelaskan bahwa adanya pengaruh antara kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil penelitian bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Barat akan naik apabila pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat menurun. Dengan perekonomian yang bertumbuh

dengan baik akan membantu baik pihak masyarakat maupun pemerintah dalam menjalankan perekonomian, sehingga masyarakat dapat hidup secara layak dan terjamin. Dengan adanya hasil penelitian tersebut dapat membantu pihak pemerintah untuk menganalisa serta menerapkan kebijakan yang dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk menjadi faktor utama dalam masalah kemiskinan di Kecamatan Ngoro. Hal ini disebabkan oleh peran masyarakat dan pemerintah yang kurang baik dalam mengelola sumber daya baik alam maupun manusia di Kecamatan Ngoro. Dengan demikian, kemiskinan di kecamatan Ngoro mengalami perubahan naik dan turun pada setiap tahunnya. Perekonomian yang tidak stabil sangat mempengaruhi roda perekonomian dan kesejahteraan di Kecamatan Ngoro Fathurohman dkk. (2022).